

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan wilayah pada sebuah negara yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang juga memiliki batas wilayah tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat (12) Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi, maka semakin sulit pula bagi pemerintah untuk mengelola sekian banyak wilayah di Indonesia dengan semakin tingginya keberagaman masyarakatnya. Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan di Indonesia terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga dampak ada tingginya kemiskinan di Indonesia. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemeberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut di ikuti dengan pengawasan yang kuat.

Pembangunan desa mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim dipedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam

pembangunan desa Kepala Desa berkedudukan sebagai subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapata yaitu:

1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil .
2. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi Desa mempunyai pendapatan asli Desa (PADes) yang tinggi.
3. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.
4. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh dinas. Program semacam itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

Dana Desa Yang di kucurkan dari Tahun 2015-2019 yang bersumber dari APBN Dapat di gambarkan pada tabel berikut

Tabel 1.1
Dana Desa Provinsi NTT 2015-2019

| NO | Tahun | Jumlah (Rp) |
|-----------|--------------|----------------------|
| 1 | 2015 | 812.875.565.000 |
| 2 | 2016 | 1,800.000.000.000 |
| 3 | 2017 | 2,300.000.000.000 |
| 4 | 2018 | 2,500.000.000.000 |
| 5 | 2019 | 3,200.000.000.000 |

Sumber: ekorantt/2019/07/17/seksinya-dana-desa

Dana Desa yang di kucurkan oleh pemerintah pusat untuk NTT setiap

tahun mengalami peningkatan yang sangat besar sebagai upaya pemerintah dalam menurunkan warga miskin.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan di dorong semua elemen menuju Otonomi Desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa pada tahun 2018 melalui Alokasi Dana Desa mencapai Rp. 1.131.473.276,- untuk Desa Ranggi, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instasi pemerintah, dan desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Menurut Doller & Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektivitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota ke

Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2008). Selain itu juga desa masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan diatas, diharapkan keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparatis pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini yaitu: “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Ranggi Kecamatan Waeri'i Kabupaten Manggarai”

Tabel 1.2
Pagu Dana Desa(Dd) Alokasi Dana Desa(Add) Dan Bhprd
(Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah) Desa Ranggi
Kecamatan Waeri'i Kabupaten Manggarai.

| TAHUN | SUMBER DANA | ANGGARAN | RINCIAN KEGIATAN | |
|-------|----------------------------|---------------|--|------------------------|
| | | | BIDANG | REALISASI |
| 2014 | ADD | 40.000.000 | Bidang Penyelenggaraan Masyarakat | 12.000.000 |
| | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 28.000.000 |
| | TOTAL ANGGARAN | 40.000.000 | TOTAL REALISASI | 40.000.000 |
| TAHUN | SUMBER DANA | ANGGARAN | RINCIAN KEGIATAN | |
| | | | BIDANG | REALISASI |
| 2015 | ADD | 675.951.523 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 218.725.457 |
| | DD | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 410.500.000 |
| | BHPRD | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 14.429.695 |
| | BANTUAN PROVINSI DAN PADes | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 9.546.371 |
| | | | Bidang Tak Terduga | 10.000.000 |
| | | | Pembelian ATK | 2.250.000 |
| | | | Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat | 10.500.000 |
| | TOTAL ANGGARAN | | 675.951.523 | TOTAL REALISASI |
| TAHUN | SUMBER DANA | ANGGARAN | RINCIAN KEGIATAN | |
| | | | BIDANG | REALISASI |
| 2016 | ADD | 1.055.704.237 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | 291.455.643 |

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|
| | | | Desa | |
| | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 584.051.345.01 |
| | DD | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 38.897.248 |
| | | | Bantuan Perumahan Tidak Layak Huni | 113.300.000 |
| | BHPRD | | Bidang Tak Terduga | 10.000.000 |
| | SILPA THN SESUDA DAN SEBELUMNYA | | ATK | |
| | TOTAL ANGGARAN | 1.055.704.237 | TOTAL REALISASI | 1.045.704.274 |
| TAHUN | SUMBER DANA | ANGGARAN | RINCIAN KEGIATAN | |
| | | | BIDANG | REALISASI |
| 2017 | ADD | 1.235.901.962 | Bidang penyelenggaran pemerintahan desa | 331.692.922 |
| | DD | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 751.806.752 |
| | BHPRD | | Biang pembinaan kemasyarakatan | 37.852.315 |
| | | | Bidang pemberdayaan masyarakat | 4.400.000 |
| | | | Bidang tak terduga | 10.000.000 |
| | | | Bantuan Rumah tak layak di huni | 100.150.000 |
| | TOTAL ANGGARAN | 1.235.901.962 | TOTAL REALISASI | 1.235.901.962 |
| TAHUN | SUMBER DANA | ANGGARAN | RINCIAN KEGIATAN | |
| | | | BIDANG | REALISASI |
| 2018 | ADD | 1.131.473.276 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 304.855.696.85 |
| | DD | | Bidang | 562.445.448.70 |

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | Pelaksanaan Pembangunan | |
| | BHPRD | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 15.916.350.76 |
| | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 114.808.784.64 |
| | | | Bidang Tak Terduga | 10.000.000 |
| | | | Bantuan Rumah Tidak Layak di Huni | 119.999.997.48 |
| | TOTAL ANGGARAN | 1.131.473.276 | TOTAL REALISASI | 1.128..026.278 |

Sumber: Desa Ranggi Kecamatan Waeri'I Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan Dari data di atas bahwa anggaran yang di terima dari Tahun 2014 samapai Tahun 2018 di peruntukan untuk program kegiatan desa sudah efektif atau belum. Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Ranggi Kecamatan Waeri'i Kabupaten Manggarai ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan Pembangunan Fisik

Desa Ranggi Kecamatan Waeri'i Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Ranggi Kecamatan Waeri'i Kabupaten Manggarai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Ranggi Kecamatan Waeri'i Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ranggi Kecamatan Waeri'i Kabupaten Manggarai.

Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi Pemerintah Desa Ranggi Kecamatan Waeri'i Kabupaten Manggarai dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) agar lebih efektif diwaktu yang akan datang.
2. Sebagai sumbangan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, dengan objek yang relevan mengenai Alokasi Dana Desa.